

BAB II

KEBIJAKAN KOREA SELATAN TERHADAP KOREA UTARA

Bab II ini akan membahas tentang kebijakan yang diambil Korea Selatan terhadap Korea Utara dari pemerintahan yang dahulu hingga tahun 2017. Yaitu dari pemerintahan Presiden Korea Selatan yang pertama, Syngman Rhee hingga pemerintahan Park Geun Hye.

Bab ini akan menunjukkan berbagai kebijakan yang pernah diterapkan di Korea Selatan untuk menangani masalah dengan Korea Utara. Dan dalam bab ini juga akan terlihat perbedaan kebijakan yang pernah diambil oleh Presiden Korea Selatan sebelum Moon Jae In.

A. Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara Pasca Perang Hingga Tahun 1998

Syngman Rhee adalah Presiden pertama Korea Selatan dan salah satu tokoh yang mempelopori terjadinya kemerdekaan di Korea Selatan. Masa pemerintahan Syngman Rhee yaitu tahun 1948 hingga tahun 1960. Pemerintahan Syngman Rhee mengambil kebijakan “Pukch’in t’ongil” atau “March North for Unification”, yang secara eksplisit kebijakan ini mengenai penerapan kebijakan unifikasi yang berkaitan dengan Korea Utara. Dalam kebijakan unifikasi, Korea Selatan akan menggunakan kekuatan senjata dan secara tegas menolak hidup secara berdampingan bersama Korea Utara dengan damai (Cha, “Rhee-straint”: The Origins of the U.S.-ROK Alliance, 2011).

Untuk mencapai reunifikasi di Korea, Presiden Rhee berusaha melakukannya dengan cara menaklukkan komunisme Korea Utara dan tetap mempertahankan keinginannya untuk tidak berdamai dengan Korea Utara. Langkah-langkah yang diambil oleh Rhee dalam kebijakan reunifikasi tersebut

dilatarbelakangi oleh rasa tidak percaya dan anti terhadap komunisme Korea Utara (Mohtar Masoed, 2004). Dan juga pemerintah Korea Selatan mengklaim bahwa hanya pemerintahannya sajalah yang sah di kawasan Semenanjung Korea. Klaim tersebut berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB No 195 Tahun 1948. Resolusi tersebut menjelaskan bahwa satu-satunya pemerintahan yang sah di kawasan Semenanjung adalah pemerintahan Republik Korea karena didirikan melalui pemilu. Usaha yang dilakukan Rhee untuk mencapai tujuannya yaitu dengan meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat. Kekuatan militer Amerika Serikat digunakan Korea Selatan untuk dalam mempertahankan kemerdekaan serta menyatukan kembali Korea (Han K.-s. S., 2001).

Presiden Rhee mempunyai peran dalam mempertahankan kemerdekaan Korea Selatan dari berbagai ancaman Korea Utara seperti ancaman komunis. Rhee dalam mengambil kebijakannya yaitu berdasarkan ideologi yang ia anut, yaitu ideologi anti komunis dan anti Jepang. Pemerintahan Presiden Syngman Rhee lengser pada April 1960 karena digulingkan oleh mahasiswa yang melakukan aksi pemberontakan (Cha, "Rhee-straint": The Origins of the U.S.-ROK Alliance, 2011).

Setelah lengser, kepemimpinan Syngnam Rhee digantikan oleh Yun Bo-seon. Yun menjabat sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 1960 hingga tahun 1962 sehingga peran Yun tidak begitu terlihat dalam mengatasi masalah dengan Korea. Tetapi, Yun sangat mengkritik cara kepemimpinan otoriter yang dilakukan Rhee. Hingga pada akhirnya Yun kudeta oleh Park Chung Hee yang selanjutnya akan menggantikannya menjadi Presiden Korea Selatan (Yun Po Sun, 92, Dies; Ex-President of Korea, 1990).

Park Chung Hee berhasil menjadi Presiden Korea Selatan setelah berhasil melakukan kudeta terhadap Presiden Yun. Terkait dengan reunifikasi dengan Korea Utara, Park mempunyai beberapa kebijakan mendasar. Kebijakan tersebut

antara lain, pertama pemerintahan Park Chung Hee menggunakan anti komunisme sebagai kebijakan nasionalnya. Kedua, Korea Selatan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dengan adanya kerjasama dengan Amerika Serikat hal ini dapat mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya dan legitimasi domestik dan internasionalnya. Bagi Park, Amerika Serikat dapat mewakili sumber daya yang mutlak diperlukan untuk pembangunan ekonomi Korea Selatan dan kehadiran Amerika Serikat dalam urusan Korea menjadikan parameter Park dalam menentukan dalam perumusan modernisasi (Hyung).

Pada tahun 1979, Park Chung Hee akhirnya meninggal karena dibunuh pada saat menghadiri acara makan malam di Korean Central Intelligence Agency (KCIA). Di Korea Selatan peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa 10.26. Sebelumnya, Park juga berusaha dibunuh oleh Korea Utara yaitu dengan mengirimkan prajuritnya sebanyak 31 orang ke Korea Selatan pada saat pidatonya. Namun, usaha itu gagal dan mengakibatkan tewasnya dua orang lainnya yang salah satunya adalah istrinya (Yasinta, 2018).

Setelah meninggalnya Park Chung Hee, Choi Kyu-ha yang waktu itu menjadi Perdana Menteri dilantik sebagai Presiden. Tapi pada tahun 1980, Choi mengundurkan diri sebagai Presiden. Dan akhirnya kepemimpinannya digantikan oleh Chun Doo-hwan. Presiden Chun dalam kebijakannya lebih berfokus pada kebijakan domestiknya yaitu memperkuat perdagangan Korea Selatan (Han K.-s. S., 2001, hal. 126).

Pada tahun 1980, kepemimpinan Korea Selatan di pegang oleh Roh Tae-woo. Roh dalam masalah reunifikasi mempunyai kebijakan yang dinamakan Nordpolitik. Kebijakan ini mengarah pada pembentukan hubungan diplomatik Korea Selatan dengan sekutu besar Korea Utara yaitu Uni Soviet dan China. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintahan Roh juga berusaha menjangkau hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Contohnya pada tahun 1989, untuk pertama kalinya

Korea Selatan melakukan perdangan langsung dengan Korea Utara dan memulai mengadakan pertukaran di bidang olahraga (Cha, *Korean Unification: The Zero-Sum Past and the Precarious Future*, 1997). Pada bulan Desember 1991, Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani "Perjanjian Dasar". Perjanjian tersebut berisi tentang rekonsiliasi, non-agresi dan pertukaran dan kerja sama (*Agreement on Reconciliation, Non-Aggression, and Exchanges and Cooperation between South and North Korea*, 1991). Tak lama kemudian, kedua Korea mengeluarkan Deklarasi Bersama tentang Denuklirisasi Semenanjung Korea, berjanji untuk tidak memiliki, memproduksi, atau menggunakan senjata nuklir dan melarang pengayaan uranium dan pemrosesan ulang plutonium.

Kim Young-sam menjadi Presiden Korea Selatan pada tahun 1993. Kim berusaha mendekati Korea Utara untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Hal itu dilakukan Kim saat menyadari bahwa perekonomian Korea Utara semakin memburuk. Namun, usaha yang dilakukan Kim membuat sikap Korea Utara menjadi lebih keras dengan memperkuat militer dan mengembangkan senjata yang lebih modern (Mohtar Masoed, 2004, hal. 167).

B. Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara di Era Kim Dae Jung

Kim Dae Jung secara resmi terpilih menjadi Presiden Korea Selatan pada Februari 1998. Pada kepemimpinannya, Kim membentuk sebuah kebijakan yang diberi nama "Sunshine Policy". Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, meredakan ketegangan militer, membangun kepercayaan serta membangun adanya perdamaian dengan Korea Utara (Moon, 2012, hal. 1).

Dengan adanya kebijakan "Sunshine Policy", hubungan kedua negara menjadi membaik. Hal ini ditandai dengan disepakatinya proyek pariwisata dan turisme di Gunung Kumgang yang akan dibangun bersama dengan Korea Utara pada tahun 1998. Selain itu, pada tahun yang sama kedua

negara telah sepakat akan membangun Komplek Industri Kaesong (Moon, 2012, hal. 4). Kawasan Industri Kaesong merupakan bentuk kerjasama lintas perbatasan antar keduanya. Dalam kawasan Kaesong tersebut, terdapat kurang lebih 124 perusahaan asal Korea Selatan. Dimana terdapat lebih dari 53 ribu orang yang berasal dari Korea Utara untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Kawasan Kaesong juga merupakan sumber keuangan bagi Korea Utara, mengingat perekonomian Korea Utara yang lemah (Pasifik, 2016).

Pada tahun 2000, Kim Dae Jung berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Korea (*Korean Summit*) di Pyongyang, Korea Utara. Pada konferensi tersebut, kedua pemimpin bertemu untuk pertama kalinya semenjak tahun 1948. Presiden Kim Dae Jung juga memperoleh Penghargaan Nobel atas pencapaiannya yang terbilang sukses (Moon, 2012, hal. 4).

Namun demikian walaupun sudah terdapat pencapaian atas *Sunshine Policy*, pada masa pemerintahan Kim Dae Jung masih terdapat konfrontasi militer antar kedua negara. Pada tahun 1998, terjadi pertempuran laut di wilayah perbatasan Laut Kuning. Peristiwa pertempuran laut tersebut kembali terjadi pada tahun 2002 yang mengakibatkan tenggelamnya kapal milik Korea Selatan (Dinnata, 2016).

C. Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara di Era Roh Moon-hyun

Presiden Roh Moon-hyun dalam kepemimpinannya juga menggunakan kebijakan *Sunshine Policy* yang sebelumnya digunakan oleh Presiden Kim Dae Jung. Pada saat pemerintahannya, hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara semakin membaik. Walaupun, pada tahun 2003 isu kepemilikan senjata nuklir Korea Utara muncul kembali. Dan pada saat itu Korea Utara menuduh Amerika telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Namun demikian, Roh berkomitmen tetap menjaga hubungan baik dengan Korea Utara (*Sunshine Policy*, 2015).

Dengan adanya hubungan yang semakin membaik, hal itu membuat terlaksananya pertemuan-pertemuan antar kedua negara. Hingga tahun 2004, sebanyak 56 telah berhasil dilaksanakan. Presiden Roh jugamelanjutkan kerja sama dalam proyek yang dimulai di bawah Kim Dae-jung. Proyek tersebut seperti diseleggarakannya peresmian pariwisata dan turisme di Gunung Kungang. Selain itu juga dibukanya kawasan Industri Kaesong pada tahun 2004. Di tahun 2004 beberapa perusahaan Korea Selatan sudah mulai beroperasi (Dinnata, 2016).

Pada masa pemerintahan Presiden Roh juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara yang saat itu sedang mengalami masalah kelaparan. Bahkan Korea Selatan dibawah kepemimpinannya telah membelanjakan lebih dari \$ 324 juta untuk bantuan tersebut pada tahun 2005 (Sunshine Policy, 2015).

D. Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara di Era Lee Myung Bak

Diangkatnya Lee Myung Bak menjadi Presiden membuat hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang awalnya membaik menjadi kembali memanas. Hal ini dikarenakan sikap politik dan pandangannya dalam menyikapi Korea Utara berbeda dengan para pendahulunya. Presiden Lee memutuskan untuk tidak melanjutkan kebijakan *Sunshine Policy*. Hal ini dikarenakan menurut Lee, kebijakan tersebut tidak efektif untuk menekan Korea Utara dalam uji coba rudalnya. Pemerintah Korea Selatan hanya akan memberikan anggaran tanpa adanya hasil timbal balik dari Korea Utara (Kim H. N., 2011).

Presiden Lee membuat kebijakan luar negeri yang dinamakan “MB Doctrine” atau *Denuclearization and Opening 3000*. Doktrin ini memiliki tujuh prinsip, antara lain:

1. Deneklurisasi penuh Korea Utara dan memaksa keputusan strategis Kim Jong-II.
2. Diplomasi pragmatis berdasarkan konsensus nasional.

3. Untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan bersama maka diperkuat aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat.
4. Memperluas diplomasi di wilayah Asia untuk mengarah ke era Asia yang lebih terbuka.
5. Kontribusi kepada komunitas global.
6. Bergabung dengan negara-negara yang mempunyai ekonomi maju dengan menggunakan diplomasi energi.
7. Memanfaatkan budaya untuk soft power Korea Selatan.

Namun point-point diatas tidak sepenuhnya kebijakan yang ditujukan untuk Korea Utara. Hanya point nomor satu yang ditujukan untuk Korea Utara terkait dengan nuklirnya (Kim T. , 2007).

Makna dari *Opening 3000* pada kebijakan luar negeri Lee yaitu untuk membantu Korea Utara dalam meningkatkan pendapatan perkapita, Lee akan memberikan bantuan hingga 300 dolar dalam waktu 10 tahun. Namun Lee mengajukan syarat yaitu Korea Utara harus menonaktifkan semua program nuklir yang dimilikinya. Jika Korea Utara menerima proposal ini, pemerintah Korea Selatan akan memberikan paket bantuan ekonomi yang tepat yang akan membantu meningkatkan kondisi kesehatan dan perumahan Korea Utara (Kim T. , 2007).

Lee Myung Bak mengeluarkan kebijakan yang lebih keras tersebut karena kekhawatirannya terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara. Hal tersebut tentu dikarenakan dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah negaranya. Untuk mencegah adanya ancaman dari Korea Utara, Korea Selatan melakukan kerjasama dengan Amerika di bidang militer. Pada tahun 2008, Korea Selatan ikut serta dalam *Proliferation Security Initiative* (PSI) atau Gagasan Pencegahan dan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Massal. Setelah menjadi anggota PSI, Korea Selatan mempunyai wewenang yaitu berhak untuk mencegah kapal-kapal milik Korea Utara yang diduga mengangkut bahan-bahan yang

digunakan dalam pengembangan nuklirnya (Makna dan Latar Belakang dari Partisipasi Korea Selatan dalam PSI, 2008).

Pada tahun 2008 juga telah dilaksanakan latihan tahunan yaitu *Ulchi Focus Lens* (UFL). Latihan ini juga merupakan bentuk kerjasama dengan Amerika Serikat. Dalam latihan tersebut melibatkan tentara Amerika Serikat yang melakukan latihan selama 12 hari. Latihan UFL ini memiliki tujuan yaitu untuk menanggapi isu invasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal ini tentu menimbulkan reaksi berupa kecaman dari Korea Utara. Namun, Korea Selatan tetap pada keputusannya untuk melakukan latihan bersama Amerika Serikat. Alasan Korea Selatan tetap melaksanakan latihan tersebut karena menganggap bahwa itu untuk pertahanan mereka. Mengingat program nuklir Korea Utara yang sewaktu-waktu dapat diluncurkan (Pike, 2015).

Dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan Korea Utara, Lee memang cenderung lebih keras dibandingkan pendahulunya. Misalnya saat Lee memutuskan hubungan dengan Korea Utara di bidang perdagangan. Korea Selatan justru meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat yaitu dengan latihan-latihan militer seperti yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu, Lee juga berusaha meningkatkan hubungan Korea Selatan dengan negara-negara di Semenanjung Korea termasuk Jepang. Usaha tersebut dilakukan dengan cara menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara tersebut (Djelantik, 2015).

Selain itu, Presiden Lee Myung Bak juga mengurangi jumlah anggaran yang digunakan untuk bekerjasama dengan Korea Utara. Bahkan Korea Selatan mengurangi investasinya di Korea Utara. Serta menarik kembali orang-orang yang bekerja di kawasan Industri Kaesong. Hal itu dilakukan oleh Presiden Lee guna untuk menekan dan memberi efek jera pada Korea Utara dalam melakukan aktivitas rudalnya (Djelantik, 2015).

E. Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara di Era Park Geun Hye

Park Geun Hye dalam kepemimpinannya dari tahun 2013-2016 mengambil kebijakan luar negeri “*Trust-Politic*”. Kebijakan luar negeri tersebut terdiri dari tiga kerangka besar, yaitu *Trust-building Process on the Korean Peninsula*, *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* dan *Eurasia Initiative*. Terkait dengan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, dalam kebijakan tersebut terdapat di dalam kerangka pertama. *Trust-building Process on the Korean Peninsula* yaitu upaya untuk mewujudkan kepercayaan diantara Korea Selatan dan Korea Utara dan melakukan hubungan dengan dilandasi keamanan agar dapat tercapainya perdamaian diantara keduanya (*Trust-Building Process on the Korean Peninsula*, 2013).

Dibawah pemerintahan Park Geun Hye, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara belum juga menemui titik terang. Bahkan Korea Utara semakin masif dalam melakukan aksi uji coba rudalnya. Ketegangan antar keduanya bearawal dari sikap Korea Selatan yang melakukan provokasi terhadap Korea Utara yaitu dengan menyebarkan selabaran anti keditactoran yang dilakukan oleh pemimpin Korea Utara. Provokasi ini ditujukan untuk masyarakat Korea Utara melalui udara. Korea Utara mengaanggap hal ini merupakan bentuk dari Korea Selatan yang ingin menggulingkan pemerintahan Korea Utara. Selain itu, Korea Selatan melaporkan Korea Utara ke PBB atas aktivitas nuklir yang telah dilakukan Korea Utara. Sebelumnya, pada bulan Februari Korea Utara memang memkasa akan meluncurkan nuklirnya. Daya ledak dari nuklir tersebut diperkirakan sekitar 6 sampai 7 kiloton. Daya ledak tersebut setara dengan setengah dari daya ledak bom yang jatuh di kota Hiroshima, Jepang. Hal itu menandai bahwa ada peningkatan yang signifikan program nuklir milik Korea Utara jika dibandingkan dengan uji coba pertama dan kedua. Kemudian, PBB memberikan sanksi lebih keras terhadap Korea Utara. Tentu pihak Korea Utara tidak terima sanksi yang diberikan, yang kemudian membuat Korea Utara

mengeluarkan pernyataan akan melakukan pembatalan perjanjian gendat senjata (KBS, 2013).

Kemudian Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer bersama yang diberi nama "Foal Eagle" dan "Key Resolve" (Latihan militer Amerika Serikat-Korsel dimulai, 2013). Latihan "Foal Eagle" dan "Key Resolve" merupakan latihan yang melibatkan 13.000 personil militer. Yang terdiri dari 3000 pasukan Amerika Serikat dan 10.000 pasukan Korea Selatan. Dalam latihan tersebut terdiri dari pasukan angkatan darat, laut dan udara. Latihan gabungan ini dilakukan di daerah Pyeonchang. Bentuk dari latihan ini yaitu seperti latihan pertahanan di dalam air, mendeteksi dan melakukan pengintaian kapal selam, juga melakukan operasi maritim (VOA, Beberapa Analisis Prihatin Unjuk Kekuatan Militer AS di Korea, 2013).

Reaksi dari Korea Utara terhadap Korea Selatan yang melakukan latihan gabungan dengan Amerika Serikat yaitu mengancam akan menutup kawasan Industri Kaesong. Hingga pada Maret 2013, Korea Utara memutuskan untuk menutup jalur komunikasi militer dengan Korea Selatan. Padahal ini merupakan komunikasi militer yang tersisa diantara keduanya dan Korea Utara menganggap ini akan lebih berdampak serius ke Korea Selatan. Sebab sebelumnya, kedua negara ini sebelumnya mempunyai empat saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini berguna untuk mengontrol para pekerja dan lalu lintas kargo di kawasan Industri Kaesong. Ketegangan ini dipicu oleh sikap Park Geun Hye yang dianggap Korea Utara merupakan mengeluarkan kebijakan garis keras yang mengikuti pendahulunya yaitu Presiden Lee Myung Bak (Tempo.co, 2013).

Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya Korea Selatan memutuskan untuk menutup kawasan Industri Kaesong. Hal itu dikarenakan Korea Utara pada saat itu menarik semua pekerjaannya dan merupakan bentuk protes Korea Utara

terhadap Korea Selatan. Kemudian, pada tahun 2016 Korea Selatan kembali menghentikan semua aktivitas yang ada di kawasan Industri Kaesong. Ini merupakan reaksi atas uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara. Menurut Menteri Unifikasi Hong Yong-pyo, yang dilakukan oleh Korea Selatan merupakan tindakan untuk mencegah adanya pemanfaatan Industri Kaesong oleh Korea Utara dalam membiayai program-program nuklirnya (VOA, Korea Selatan Tutup Kawasan Industri Kaesong, 2016).

Pada tahun 2016, Presiden Park Geun Hye telah sepakat untuk menerapkan sistem anti rudal THAAD atau *Terminal High Altitude Area Defense*. THAAD ini merupakan bentuk kerjasama dengan Amerika Serikat dalam upaya menekan provokasi rudal Korea Utara. Dua peluncur rudal sudah berada di wilayah selatan Seongju. Tapi hal itu menimbulkan berbagai reaksi dari rakyat Korea. Karena, hal itu dapat membahayakan lingkungan (Suriawati, 2017). Hal tersebut juga memicu penolakan dari Cina, karena Cina berpendapat bahwa sistem anti rudal tersebut justru akan membuat Korea Utara semakin gencar dalam uji coba rudal dan hal tersebut juga akan memperkeruh suasana di semenanjung Korea (Samosir, 2017).